

Kebijakan Hak Asasi Manusia

APRIL Group senantiasa berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dan menjunjung tinggi filosofi bisnis kami untuk melakukan yang "Baik untuk Negara, Baik untuk Masyarakat, Baik untuk Iklim, Baik untuk Pelanggan, dan Baik untuk Perusahaan".

Perusahaan mengemban tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat dan komunitas, serta berkomitmen untuk:

- Bertindak sesuai dengan kebijakan hak asasi manusia yang diakui secara standar internasional diantaranya sebagai berikut:
 - Konstitusi Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Human Rights*)¹
 - Panduan PBB tentang Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*)
 - Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (*International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*)
 - Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*)
- Mematuhi peraturan lokal, nasional, serta perjanjian dalam skala internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jika terdapat konflik antara hukum nasional dan internasional serta kebijakan Perusahaan, kami akan mengutamakan kepatuhan terhadap hukum negara dalam upaya menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
- Menghormati sepuluh prinsip yang tertera dalam *United Nations Global Compact*.
- Mengacu pada standar internasional dan inisiatif sukarela yang dapat membantu mengatasi setiap tantangan mengenai hak asasi manusia.

Kebijakan Hak Asasi Manusia ini berlaku untuk seluruh karyawan, unit bisnis, dan badan hukum dalam APRIL Group. Kami juga akan melibatkan pemasok dan pihak lain dalam rantai pasok kami, untuk mendukung mereka memenuhi standar nasional dan internasional terkait hak asasi manusia

Terkait karyawan, kami berkomitmen untuk:

- Mencegah dan menghapuskan segala bentuk kerja paksa, memastikan karyawan bebas meninggalkan pekerjaan atau berhenti dari pekerjaan mereka melalui pemberitahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kontrak kerja.
- Memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kontrak kerja atau "syarat dan ketentuan kerja" sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- Memberikan upah layak, jam kerja, dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan hukum atau standar industri serta melibatkan para ahli yang relevan dan pemangku kepentingan lokal, seperti serikat pekerja.

¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and International Covenant on Civil and Political Rights*)

- Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran memperkerjakan pekerja dibawah umur.
- Tidak ada toleransi terhadap perlakuan tidak manusiawi terhadap karyawan, segala bentuk kerja paksa, perbudakan modern, perdagangan manusia, hukuman fisik atau jenis kekerasan lainnya.
- Mendorong penyeteraan kesempatan kerja dan keberagaman di tempat kerja, termasuk kesempatan dan partisipasi yang setara untuk perempuan, serta berupaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan pelecehan.
- Melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman.
- Menghormati hak semua karyawan untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja sesuai pilihan mereka tanpa takut adanya pembalasan atau diskriminasi.

Mengelola Dampak Hak Asasi Manusia

Kami berupaya untuk mengelola dan mengurangi resiko pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi dan seluruh rantai pemasok kami melalui kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (*Human Right Due Diligence - HRDD*). Kami mengakui pentingnya masyarakat sekitar dan hak atas mata pencaharian mereka, hak-hak kelompok rentan (seperti kelompok masyarakat adat, perempuan, pekerja migran dan pekerja tidak tetap) di tempat kami beroperasi.

Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk:

- Mengembangkan dan menerapkan kerangka Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (*Human Rights Due Diligence - HRDD*) untuk mengidentifikasi pemegang hak dan hak-hak asasi mereka, serta potensi dan dampak sesungguhnya dari kegiatan kami terhadap hak asasi manusia.
- Mencegah atau mengurangi setiap resiko pelanggaran hak asasi manusia yang teridentifikasi atau berpotensi merugikan terkait dengan kegiatan operasional kami.
- Memastikan kerjasama perusahaan untuk pemulihan (*remediation*) dari setiap dampak pelanggaran hak asasi manusia secara tepat waktu dan adil, dan melalui proses yang sah.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kami melibatkan pemangku kepentingan dan/atau perwakilan mereka dalam mengidentifikasi dan mencegah risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Kami berkomitmen untuk:

- Melibatkan pemangku kepentingan terkait dan/atau perwakilan yang sah melalui dialog yang transparan.
- Mengakui pentingnya keberagaman dan kearifan lokal dalam komunitas kita serta memahami perbedaan kebutuhan dari kelompok-kelompok di dalam komunitas.
- Melibatkan pemasok perusahaan dalam hal pendekatan hak asasi manusia mereka untuk memastikan dampak sosial yang lebih luas.
- Membina kemitraan yang kuat dan mendukung mata pencaharian masyarakat lokal.

Mekanisme Pengaduan dan Akses ke Pemulihan

Kami memiliki mekanisme penanganan keluhan daring dan luring yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan setiap potensi masalah, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia.

Karyawan juga dapat melaporkan masalah yang mereka hadapi melalui *hotline Whistleblowing* tertutup dan rahasia dengan jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Semua keluhan dan masalah yang disampaikan akan dicatat dan diinvestigasi untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan.

Kami berkomitmen untuk:

- Memastikan bahwa tidak seorang pun akan dihukum karena menyampaikan dugaan pelanggaran Kebijakan perusahaan, atau masalah apapun terkait hukum atau etika kepada manajemen
- Memastikan kerja sama dalam proses remediasi/pemulihan yang efektif secara tepat waktu, adil dan sah, termasuk melalui dialog dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Memantau keefektifan mekanisme penanganan keluhan perusahaan secara berkala.

Tata Kelola dan Pelaporan

Menghormati hak asasi manusia merupakan salah satu bagian terpenting dari pendekatan manajemen dan komitmen keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Di Grup APRIL, Komite Eksekutif yang terdiri dari Presiden dan pimpinan seluruh unit bisnis akan memastikan penerapan tata kelola keberlanjutan yang tangguh, termasuk hak asasi manusia. Hal ini juga diawasi oleh Komite Penasihat Pemangku Kepentingan independen yang berfungsi sebagai saluran bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan keprihatinan dan keluhan mereka, di antara fungsi-fungsi lainnya.

Kami akan meninjau dan melaporkan kemajuan yang dicapai dalam mengidentifikasi, mencegah, dan remediasi setiap kasus pelanggaran. Hal ini akan disampaikan melalui Laporan Keberlanjutan Tahunan perusahaan, serta melalui situs web kami secara teratur.

Sejalan dengan proses peningkatan bisnis kami secara keseluruhan, kebijakan ini akan dipantau dan ditinjau secara berkala.

Praveen Singhavi

President APRIL Group

January 2022